

## KAPASITAS KELEMBAGAAN LOKAL DALAM PENGELOLAAN AIR BERBASIS MASYARAKAT PEDESAAN DI DESA SROGOL KECAMATAN CIGOMBONG KABUPATEN BOGOR

**Rifqi Abdul Hafidh<sup>1</sup>, Ida Widianingsih<sup>2</sup>, Ahmad Buchari<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Program Studi Magister Administrasi Publik, FISIP, Universitas Padjajaran

<sup>2</sup> Pusat Studi Desentralisasi dan Pembangunan Partisipatif, FISIP, Universitas Padjajaran

<sup>3</sup> Departemen Administrasi Publik, FISIP, Universitas Padjajaran

E-mail: rifqi19001@mail.unpad.ac.id

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapasitas kelembagaan lokal dalam pengelolaan air di Desa Srogol, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor dengan menggunakan lima dimensi kapasitas kelembagaan dari Willem (2004). Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan analisis data sekunder dari instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lima dimensi yang digunakan untuk melihat kapasitas kelembagaan, hanya satu dimensi yang berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan yang ada, yaitu dimensi Norma Sosial, Nilai dan Praktik. Untuk empat dimensi lainnya yaitu, dimensi individu, dimensi organisasi, dimensi jaringan organisasi, dan dimensi tata kelola publik masih perlu ditingkatkan. Kapasitas kelembagaan *Janggal* dalam pengelolaan air memerlukan aturan yang mengatur kerjasama antar semua actor pembangunan di desa, utamanya pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dalam pengelolaan air. Pemerintah Desa dapat mendukung *Janggal* melalui pelatihan pengelolaan air pada level komunitas.

**Kata Kunci:** *Organizational Capacity; Local Institutions; Water Management.*

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the capacity of community-based water management in Srogol Village, Cigombong Sub-District, Bogor Regency using five dimension of government capacity of Willem (2004). The research used a qualitative descriptive approach through observation, interview and secondary data analysis from the relevant agencies. The results showed that out of the five dimensions used to examine the institutional capacity, only one dimension contributes to the improvement of the existing institutional capacity, namely the dimensions of Social Norms, Values and Practices. The other four dimensions, such as individual, organizational, organizational network, and public governance dimensions need to be improved. The institutional capacity improvement of *Janggal* as a community-based water management requires special attention from village development stakeholders. Village government could contribute to support the enhancement of the *Janggal* capacity through community-based water management training.*

**Keywords:** *Organizational Capacity; Local Institutions; Water Management.*

### PENDAHULUAN

Keterlibatan masyarakat dalam tata Kelola air merupakan hal yang sangat signifikan, hal ini sesuai dengan kajian yang dilakukan oleh Carney (1998). Carney mengemukakan adanya 3 aspek utama dalam pengelolaan air berbasis

masyarakat yakni aspek lingkungan (ekosistem dan sumber dayanya), aspek kelembagaan (kapabilitas lembaga, pengetahuan, serta jumlah tenaga kerja), dan aspek sosial (jejaring masyarakat dan norma yang berlaku) (Carney, 1998). Selaras dengan Carney, Pailer dkk

menyatakan bahwa pengelolaan air yang baik tidak terlepas dari kapasitas lembaga pengelolanya dan sejauhmana pemangku kepentingan memberikan kontribusi dalam pengelolaan air sesuai dengan peran masing-masing (Pailler et al., 2015). Lebih jauh lagi, riset yang dilakukan Widyawati, dkk menemukan aspek kapasitas kelembagaan merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan daerah (Widyawati et al., 2018).

Pada tataran global, pengelolaan sumber daya air masyarakat mengalami dinamika yang cukup beragam. Bahkan ada kecenderungan terjadinya ketidakseimbangan antara kebutuhan air dengan ketersediaan air bersih. Data yang dikemukakan oleh *United Nations University Institute for Water, Environment and Health* (UNU-INWEH), menkonfirmasi sulitnya masyarakat dalam mengakses air bersih. Walaupun permukaan bumi 70% nya terdiri dari air, namun hanya 2,5% merupakan air bersih. Berdasarkan laporan proyeksi ketersediaan air pada tahun 2050, akan terjadi lonjakan kebutuhan air hingga 400% untuk sector manufaktur dan 130% untuk sektor perumahan. Peningkatan dari jumlah pengguna air ini kemungkinan dapat menyebabkan kesenjangan ketersediaan air sebesar 40% yang akan terjadi mulai tahun 2030. Disamping itu, UNU-INWEH mengungkapkan setidaknya 411 juta

manusia di dunia terdampak oleh berbagai bencana yang berkaitan dengan air. 94% bencana merupakan kekeringan dan sulitnya akses air bersih (UN-Water, 2013).

Urgensi krisis air yang menjadi fenomena global, diantaranya mendorong isu ketahanan air menjadi poin penting dalam pencapaian agenda pembangunan masyarakat yang dimuat dalam *Sustainable Development Goals* (SDG's). Pentingnya pengelolaan sumber daya air yang dilakukan oleh masyarakat local perlu terus menerus didorong agar dapat mencapai pengelolaan ideal yang efektif. Fenomena krisis air tidak terbatas pada kurangnya ketersediaan air, namun juga berkaitan dengan lemahnya kapasitas pengelolaan dan manajemen sumber daya air, serta minimnya ketersediaan infrastruktur pendukung (Lieberherr & Ingold, 2019).

Di Indonesia, kebijakan pengelolaan sumber daya air dibahas dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2004. Konstitusi negara Republik Indonesia menekankan adanya tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan akses air bersih melalui berbagai program pembangunan.

Namun demikian, luas wilayah dan jumlah penduduk yang sangat banyak dengan penyebaran yang luas menyebabkan kemampuan pemerintah

dalam penyelesaian permasalahan kebutuhan air di masyarakat terbatas.

Sejauh ini, layanan penyediaan air bersih yang disediakan pemerintah dilakukan melalui Perusahaan Daerah Air minum di berbagai wilayah di Indonesia, namun cakupan layanannya masih terbatas. Sebagian besar PDAM baru beroperasi di wilayah perkotaan, masyarakat desa belum memperoleh layanan yang baik.

Masyarakat desa cenderung mengelola kebutuhan air secara mandiri, beberapa di antaranya belum memiliki legalitas kelembagaan yang ajek. Saat ini ada beberapa program bantuan penyediaan air bersih yang diinisiasi pemerintah, seperti Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), P3A (Paguyuban Petani Pengguna Air), dan PSAB (Penyedia Sarana Air Bersih). Namun, program-program ini belum tersebar secara merata.

Dengan demikian, diperlukan model ataupun strategi yang tepat, sesuai dengan karakteristik masyarakat desa agar dapat menangani permasalahan pengelolaan sumber daya air secara lebih terlembaga.

Berdasarkan kajian yang dilakukan, pemerintah desa belum memiliki acuan yang pasti terkait lembaga pengelola air di tingkat lokal. Pada prakteknya, lembaga pengelola pada level komunitas memiliki aturan main dan cara pengelolaan yang

berbeda-beda. Seringkali keberadaan Lembaga local pengelola air tidak memiliki hubungan kerja atau hubungan organisasional dengan pihak desa. Hal ini menyebabkan desa kesulitan melakukan koordinasi dan membantu menguatkan peran lembaga local dalam memenuhi kebutuhan air.

Riset ini mengangkat permasalahan pengelolaan air di Desa Srogol, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Desa Srogol adalah salah satu desa di Kecamatan Cigombong, Kabupaten yang dihuni oleh 6.225 penduduk. Secara geografis, Desa Srogol berbatasan dengan 3 desa lainnya yakni Desa Pasir Buncir, Desa Watesjaya, dan Desa Ciburuy. Untuk mengakses sumber air masyarakat menggunakan Sumber Air Ciwaluh yang berada pada lokasi Desa Watesjaya. Terdapat 373 Kepala Keluarga yang menggunakan dan bergantung pada ketersediaan air dari sumber mata air tersebut (terdiri dari 144 KK berpendapatan rendah dan 219 KK berpendapatan rata-rata)

Dalam mengakses air, masyarakat Desa Srogol mayoritas menggunakan sarana pipa yang dibangun melalui dana CSR PT.TIV. Air bersih berasal dari kaki gunung Pangrango yang dialirkan langsung ke rumah tangga pengguna air, dengan menggunakan grafitasi. Untuk memastikan pemerataan dalam distribusi

air bersih, masyarakat menunjuk pengelola air lokal yang dikenal dengan istilah *Janggal*.

*Janggal* memerankan peran strategis dalam mengelola air local karena PDAM Kabupaten Bogor belum mampu memberikan pelayanan ke wilayah Desa Srogol yang berada di dataran tinggi. Disamping itu, kemampuan ekonomi masyarakat Desa Srogol masih rendah menyebabkan daya beli rendah dan tidak mampu memasang meteran air yang disediakan PDAM.

Penelitian ini secara spesifik membahas tentang kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan air di Desa Srogol. Analisis kapasitas kelembagaan menggunakan teori dari Willems (2004) yang terdiri dari dimensi kapasitas individu, kapasitas organisasi, Jaringan Organisasi, Tata Kelola Sektor Publik, dan Norma Sosial, Nilai dan Praktik (Willems, 2004).

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan, sejauh ini pengelolaan air yang dilakukan oleh *Janggal* belum dirasa optimal. Hal ini disebabkan karena *Janggal* tidak memiliki kemampuan dalam pengelolaan yang baik. Disamping itu, pemerintah Desa belum memberikan dukungan yang berarti dalam pengelolaan air yang dilakukan. Keberadaan *Janggal* yang memiliki legitimasi sosial dengan akar budaya yang kuat cenderung

melaksanakan kegiatan secara mandiri. Tidak ada koordinasi yang baik dengan masyarakat pengguna air, maupun dengan pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan air. Melihat permasalahan dalam pengelolaan yang terjadi, maka perlu dilakukan analisa atas kapasitas kelembagaan *Janggal* sebagai pengelola air.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis kapasitas kelembagaan *Janggal* dalam pengelolaan air di Desa Srogol, kecamatan Cigombong, kabupaten Bogor. Data dari penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang peneliti peroleh dari observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Untuk analisis data digunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh (Miles & Huberman, 1994) yang disebut model interaktif, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kapasitas Individu

Dimensi individu dalam pengelolaan air bersih berkaitan dengan kinerja individu pengelola air dalam menjalankan tugasnya. Fungsi kinerja pengelola air merupakan dasar keberhasilan dalam

mencapai suatu tujuan. Berkaitan dengan kapasitas kelembagaan, efektivitas kinerja pengelola air dipengaruhi oleh kesesuaian antara latar belakang pendidikan dan keterampilan dengan pekerjaan, pemberian pelatihan, dan ketersediaan jumlah pengelola air.

Sebagai organisasi yang berperan penting dalam pengelolaan air bersih, pengelola air Desa Srogol harus memiliki sumber daya manusia yang memadai. Hal ini menjadi penting untuk menghitung anggota pengelola air yang dibutuhkan, dengan perbandingan jumlah pengguna air. Berdasarkan hasil penelitian, *Janggal* hanya memiliki 7 anggota, dengan asumsi masing-masing anggota bertanggungjawab atas pengelolaan 4 bak tampungan air.

Jumlah pengguna air di Desa Srogol pada tahun 2021 sebanyak 450 sambungan pipa menuju rumah warga. Idealnya, *Janggal* membutuhkan sekitar 15 orang untuk melayani masyarakat pengguna air tersebut. Dari data yang diperoleh diketahui bahwa *Janggal* memiliki 7 pegawai, yang menjalankan pengelolaan air secara sukarela. Sehingga dari segi kebutuhan sumber daya manusia (SDM) *Janggal* kurang memadai.

Berkaitan dengan tingkat pendidikan, pendidikan anggota *Janggal* cukup beragam, sebagaimana terlihat dari tabel berikut:

**Tabel 1. Latar belakang Pendidikan dan pekerjaan *janggal***

Nama	Latar belakang Pendidikan	Latar belakang pekerjaan
YS	SMP	Peternak dan Pemburu Satwa Burung, Penceramah Seremoni Ibadah
RS	SMP	Peternak dan Pemburu Satwa Burung
OH	SMA	Linmas, Peternak, Penggarap Kebun
AD	SD	Peternak dan Penggarap Kebun
LL	SMA	Peternak dan Penggarap Kebun
AS	SMA	Seniman dan Ketua RT
NN	SMA	Peternak dan Penggarap Kebun

Sumber: Hasil olahan peneliti, 2021.

Pada tabel di atas terlihat bahwa 7 anggota *Janggal* memiliki latar belakang sampai dengan tingkat menengah, yang terdiri dari lulusan, SMA. Dari 7 pegawai tersebut, 4 di antaranya lulusan SMA, 2 lulusan SMP, dan 1 lulusan SD, dan tidak

terdapat jenjang sarjana. Sedangkan latar belakang pekerjaan masing-masing sedangkan latar belakang pekerjaan, rata-rata *Janggal* tidak bekerja sebagai pegawai negeri ataupun swasta. Dominasi

pekerjaan anggota *Janggol* adalah peternak dan penggarap lahan perkebunan.

Karakteristik pekerjaan pengelolaan air yang bersifat sukarela menyebabkan pemilihan anggota *Janggol* tidak memperhatikan latar belakang Pendidikan dan pekerjaan pengelola air. Pemilihan anggota *Janggol* dilakukan oleh pihak pemberi bantuan sarana pipa air dengan pertimbangan memilih individu yang bersedia bertanggung jawab dalam mengelola air untuk masyarakat.

Dengan pemilihan yang bersifat sukarela, anggota *Janggol* tidak memiliki keterampilan pengelolaan air yang memadai. Tidak ada mekanisme pelatihan pengelolaan air, distribusi air dan pelayanan penyediaan air dilakukan sesuai kebiasaan lama dan ketersediaan waktu anggota *Janggol*. Apabila ada kerusakan pada saluran air, perbaikan dilakukan bersama-sama dan sukarela.

Posisi kelembagaan *Janggol* yang bersifat informal, menyebabkan tidak ada hubungan kelembagaan dengan pemerintah desa sebagai otoritas local. Pemerintah Desa sendiri tidak merasa memiliki kewajiban dalam memastikan proses distribusi air yang merata di desanya. Walaupun air merupakan kebutuhan utama masyarakat sejauh ini pemerintah desa masih mengandalkan pengelolaan air oleh komunitas. Tidak ada upaya sistemik membantu dari pemerintah Desa dalam

upaya meningkatkan kapasitas pengelolaan air.

Berdasarkan hasil penelitian komunikasi antara pengguna air, *Janggol*, dan pemerintah Desa dapat dikatakan tidak ada. Permasalahan yang muncul terkait pengelolaan air tidak dapat diatasi dengan cepat. Misalnya Di musim kemarau, saat air terbatas, banyak keluhan dari pengguna air yang tidak memperoleh supply air ke rumah atau kebun mereka. Biasanya pengguna menyampaikan keluhan (protes) secara langsung kepada *Janggol* tanpa ada respon yang memadai. Satu sisi pengguna air berhak menyampaikan keluhannya, namun *Janggol* sendiri bukan seorang pekerja profesional yang dapat menyelesaikan keluhan yang disampaikan.

Distribusi air yang menggunakan pipa, pada dasarnya membutuhkan perawatan rutin dengan keterampilan tertentu. Sayangnya, anggota *Janggol* yang bersifat sukarela tidak memiliki keterampilan khusus untuk merawat dan memperbaiki pipa air. Honorarium yang sangat kecil hanya cukup untuk membayar biaya transport.

Karakteristik lembaga local pengelola air yang berbasis sukarela tidak mewajibkan pengelola mengikuti peningkatan keterampilan pengelolaan air. Dengan demikian, walaupun Gibson menyatakan bahwa keterampilan pegawai

memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap peningkatan kinerja, hal ini tidak relevan dengan karakter lembaga yang berbasis komunitas (Gibson et al., 2012).

Dalam konsepnya, Gibson berpendapat bahwa keterampilan pegawai dapat dikembangkan melalui pemberian pelatihan (Gibson et al., 2012). Namun, pegawai *Janggol* tidak mendapatkan gaji bulanan yang memadai, sehingga tidak mampu menyisihkan upah sukarela untuk mengikuti pelatihan keterampilan pengelolaan air.

Berdasarkan hasil wawancara lapangan, sebenarnya pihak desa dapat memberikan bantuan keuangan untuk mendukung peningkatan kualitas pengelolaan air bersih di Desa Srogol, karena pelayanan air bersih juga merupakan salah satu kewajiban pemerintah. Namun, sejauh ini belum ada komunikasi antar pengelola air dan pemerintah desa terkait pengelolaan air di desa. Dengan demikian, ada keterkaitan yang sangat erat antara kapasitas individu dengan kemampuan dalam melakukan pengelolaan air.

### **Kapasitas Organisasi**

Selain kapasitas individu, kapasitas organisasi juga menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan air di Desa Srogol. Hal ini berkaitan dengan mekanisme kerja dan kapasitas sumber daya organisasi yang

terlibat dalam pengelolaan air di Desa Srogol.

Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di Desa Srogol adalah dengan melakukan pemantauan secara berkala terhadap kondisi sumber air dan sarana pipa air. Pemantauan sumber air perlu diperhatikan karena untuk mengetahui kondisi air baku dan berbagai upaya konservasi di wilayah sumber air. pemantauan sarana pipa air dilakukan untuk mengetahui kondisi dan status pipa, baik umur pipa, jadwal pemeliharaan pipa dan perbaikan serta perkiraan biaya perbaikan pipa.

Pemantauan sumber air meliputi, debit sungai, tinggi muka air sungai, kualitas lingkungan bantaran sungai dan kualitas air sungai. Hal ini berkaitan dengan peran Masyarakat dan Pemerintah Desa Srogol yang memiliki tanggungjawab atas kondisi sumber daya alam yang dimiliki. Namun selama ini hubungan *Janggol* dengan pemerintah desa dan masyarakat tidak berjalan dengan baik. Berdasarkan Hasil penelitian pemantauan sumber air dan sarana pipa secara berkala diperlukan, karena hal tersebut mempengaruhi kapasitas kelembagaan *Janggol* dalam mengelola air bersih.

Hasil temuan di lapangan, hanya *Janggol* yang berperan dominan dalam pengelolaan air bersih. *Janggol* tidak

pernah memberikan laporan pemantauan sumber air dan sarana pipa. Hal ini berkaitan dengan kapasitas individu yang telah dijelaskan sebelumnya. Keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dalam pengelolaan membuat pemantauan sumber air dan sarana pipa air *Janggal* tidak dilaporkan. *Janggal* tidak memiliki kemampuan untuk membuat laporan kinerja yang telah dilakukan *Janggal* dalam pengelolaan air. pada praktiknya, upaya pemantauan sumber air selalu rutin dilaksanakan setiap satu minggu satu kali. Selain itu, pemantauan terhadap sarana pipa air rutin dilaksanakan setiap hari secara bergantian oleh anggota *Janggal*.

Melihat kondisi *Janggal* desa srogol yang sangat memprihatinkan, Pemerintah Desa Srogol harus memberikan bantuan. Sebagai otoritas lokal, Pemerintah Desa Srogol adalah pucuk pemerintahan tertinggi di level desa yang memiliki tanggungjawab untuk membantu PDAM dalam hal sistem manajemen dan operasional infrastruktur pipa air. Namun kenyataannya Pemerintah Desa Srogol seolah menutup mata melihat kondisi pengelolaan air yang dilakukan oleh *Janggal*.

Kurangnya perhatian dari masyarakat dan pemerintah desa yang berkaitan dalam pengelolaan air di desa, menjadi kendala bagi *Janggal* untuk melakukan pengawasan dan akuntabilitas

terhadap pengelolaan pipa. Banyaknya sejumlah pipa yang dikelola *Janggal* harus diganti dan diperbaiki, seperti pipa air utama yang dipadati lumpur serta pipa yang rusak akibat terlindas kendaraan. Menurut *Janggal*, usulan bantuan dana untuk perbaikan infrastruktur pipa sudah diajukan ke Pemerintah Desa, namun hingga saat ini anggaran tersebut belum juga terlaksana karena terbatas anggaran dan prioritas pembangunan lain.

Selanjutnya sebagai organisasi yang berperan penting dalam pengelolaan air di Desa Srogol, *Janggal* juga memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya organisasi. *Janggal* memiliki sumber daya manusia yang rendah. Selain itu, sejak tahun 2011, *Janggal* mengalami masalah keuangan yang disebabkan tindakan korupsi yang dilakukan anggota *Janggal* sebelumnya. Hal yang paling memprihatinkan *Janggal* perlu mengeluarkan dana pribadi sebagai biaya operasional, karena banyaknya masyarakat yang menunggak dalam melakukan iuran penggunaan air.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kapasitas kelembagaan *Janggal* dalam pengelolaan air masih memiliki kapasitas organisasi yang kurang baik. Setiap elemen desa yang terlibat dalam pengelolaan air bersih tidak menjalankan perannya. Hal ini disebabkan belum



adanya peraturan mengenai sistem kerja *Janggal* dalam pengelolaan air. Selain itu, *Janggal* juga terhambat permasalahan anggaran, sehingga membuat pengelolaan air belum berjalan maksimal.

### **Jaringan Organisasi**

Jaringan organisasi atau jejaring organisasi dalam pengelolaan air akan membahas tentang hubungan kerjasama, koordinasi dan komunikasi yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan air bersih. Kompleksitas pengelolaan air bersih membutuhkan dukungan kerjasama dan komitmen yang tinggi dari berbagai pihak.

Menurut Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kerjasama semua pihak dalam pengelolaan air bersih adalah untuk menjaga keseimbangan antara berbagai kebutuhan dan prioritas yang berbeda untuk air. Pihak-pihak yang dimaksud dalam hal ini adalah Pemerintah Desa, Masyarakat, dan *Janggal* sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan air Desa Srogol.

Pelaksanaan pengelolaan oleh *Janggal*, terhadap berbagai fasilitas dan sarana yang diberikan belum terlaksana secara optimal. Hal ini terjadi karena tidak adanya tata aturan pada level desa yang menjelaskan mengenai pengelolaan air. Jaringan organisasi dalam pengelolaan air menjadi penting demi menyokong

desain dan implementasi program yang akan berkontribusi pada lingkungan, dan memastikan perkembangan dalam pembangunan masyarakat dapat berjalan seimbang (Stone & Nyaupane, 2014). Selain itu, komitmen Pemerintah Desa terhadap percepatan pelayanan air bersih di Desa Srogol masih terlibat rendah.

Selain itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sejauh ini belum pernah membahas layanan pengelolaan air oleh *Janggal*. Padahal bila hal ini dilakukan akan memiliki dampak baik bagi *Janggal* dalam mengatasi kebutuhan anggaran dan sistem manajemen yang sedang dihadapi. Lebih lanjut, Pemerintah Desa juga tidak pernah memikirkan langkah strategis untuk meligitimasi *Janggal* sebagai lembaga formal. Sedangkan Desa Srogol kian hari menghadapi kondisi debit air semakin berkurang, sementara permintaan masyarakat atas air semakin meningkat.

Selanjutnya hubungan koordinasi, Pemerintah Desa lebih berperan sebagai jembatan antara Masyarakat dan *Janggal*. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya hubungan Kerjasama, Ketika munculnya permasalahan dalam pengelolaan air *Janggal* hanya mengambil Langkah inisiatif secara subsisten (seadanya). Oleh karena itu, peran pemerintah Desa sangat dibutuhkan yang berfungsi untuk mengawasi seluruh kinerja *Janggal*, dan berperan memberikan masukan untuk meningkatkan kinerja

*Janggol*. Bila ada masalah yang sulit diselesaikan *Janggol* dapat berkoordinasi langsung dengan Pemerintah Desa.

Selanjutnya untuk komunikasi *Janggol* dalam pengelolaan air di Desa Srogol, *Janggol* belum mampu menciptakan hubungan komunikasi yang efektif terkait pengelolaan air. ketidakmampuan dalam merespon tanggapan masyarakat mempersulit pengelolaan yang dilaksanakan *Janggol*. Sejauh ini *Janggol* belum memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat. Sehingga hal ini membuat upaya pengelolaan air yang dilakukan *Janggol* kurang mendapat respon dari Pemerintah Desa dan Masyarakat.

### **Tata Kelola Sektor Publik**

Hal ini membahas konteks yang lebih luas dalam kelembagaan, meliputi regulasi sektor publik, dan regulasi hukum dalam pengelolaan air di Desa Srogol. Efektivitas sektor publik secara dalam pengelolaan air bersih dapat diukur melalui beberapa dimensi antara lain ekonomi politik, dan aturan hukum lainnya.

Belum adanya peraturan desa yang mengatur pengelolaan air oleh *Janggol* menimbulkan ketidakjelasan posisi *Janggol* di Desa Srogol. Hal ini menyebabkan penumpukan fungsi *Janggol* dalam melakukan pengelolaan air.

penumpukan fungsi ini dibuktikan dengan, pembuatan kebijakan, penentu waktu distribusi air, dan penentuan tarif penggunaan air tanpa persetujuan masyarakat dan Pemerintah Desa. *Janggol* dalam melaksanakan pengelolaan air, saat ini hanya mengacu kepada kemampuan seadanya tanpa aturan yang jelas.

*Janggol* telah menerapkan strategi untuk mendapatkan modal sosial kepada masyarakat aturan dengan pembagian waktu distribusi. Dalam upaya distribusi tersebut terdapat hal yang cukup menarik yaitu air didistribusikan setiap delapan jam sekali bagi tiap-tiap titik bak tampungan kepada masyarakat. Terdapat beberapa poin yang membahas tentang keterlibatan masyarakat, misalnya ketika adanya kegiatan keagamaan ataupun acara pernikahan yang membutuhkan air diluar waktu pembagian distribusi air. Meskipun hal tersebut belum membuat modal sosial *Janggol* sebagai pengelola air menguat, disebabkan kurangnya komunikasi antara *Janggol* dan masyarakat.

Selanjutnya dalam hal pembiayaan pemeliharaan pipa, meliputi pembiayaan untuk menambah, memperluas dan memperbaiki pipa dan konservasi hantaran sungai sumber air, saat ini mayoritas menggunakan dana pribadi. Pemungutan iuran yang dilakukan belum mampu menutupi biaya yang dibutuhkan sebagai

operasional dan perawatan pipa oleh *Janggal*.

Melihat kondisi *Janggal*, saat ini tidak dapat melakukan pengelolaan air yang efektif dan efisien. Selain masalah kapasitas anggota *Janggal* yang rendah, masalah anggaran juga membuat kinerja *Janggal* menjadi belum optimal. Perlu dipahami bahwa dalam pengelolaan air *Janggal* membutuhkan biaya yang cukup besar, mulai dari penyediaan air hingga pendistribusian ke masyarakat. dengan kondisi *Janggal* yang ada. tentunya dibutuhkan pihak lain untuk membantu *janggal* di Desa Srogol dalam pengelolaan air bersih.

Pada dasarnya keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan air telah terjadi, berupa bantuan infrastruktur pipa air sepanjang 4,45 Kilometer. Berdasarkan hasil penelitian hanya bantuan tersebut yang diterima oleh *Janggal*. Namun, kurangnya pengetahuan dan ketermapilan dalam pengelolaan, khususnya dalam pendataan asset pipa dan bentang distribusi yang tidak tertulis membuat sulitnya muncul hubungan kerjasama antara Pemerintah Desa, *Janggal* dan pihak swasta dalam pengelolaan air kedepannya. Meskipun tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti suatu saat akan ada hubungan kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan air bersih di kemudian

hari dengan catatan atas perbiakan sistem pengelolaan yang dilakukan.

### **Norma Sosial, Nilai, dan Praktik**

Pada indikator ini, norma, nilai, dan praktik menunjukkan lingkungan budaya, ekonomi, dan sosial suatu daerah. Pelaksanaan pengelolaan air bersih juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat (sosial budaya). Kesesuaian kebijakan dalam pengelolaan air bersih dengan lingkungan masyarakat mampu menciptakan hubungan kerjasama yang baik antara *Janggal*, dengan pemerintah desa dan masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pengelolaan air.

*Janggal* dalam memberikan pelayanan air kepada masyarakat telah membangun beberapa sarana pipa air abru yang terletak di dua dusun. Pembangunan sarana pipa di dua dusun tersebut disambut baik oleh masyarakat setempat. Meski harus membayar tarif untuk mendapatkan air dari *Janggal*, masyarakat tidak keberatan. Masyarakat berpendapat bahwa keberadaan air *Janggal* di wilayah mereka sangat membantu mereka, khususnya untuk memenuhi kegiatan MCK. Menurut salah seorang warga, setelah pembangunan sarana pipa baru di wilayahnya ia tidak lagi harus membeli dan mengantri untuk mendapatkan air bersih.

Meski pembangunan sarana pipa air ini berada di kawasan pemukiman, tidak serta merta seluruh masyarakat di wilayah tersebut mendapatkan sambungan pipa air. Seperti halnya pipa air di Kampung Pangarakan, sambungan perpipaan hanya menjangkau kurang dari 10 pengguna. Hal ini disebabkan karena kondisi geografis wilayah tersebut, yang menyebabkan debit air yang dihasilkan sangat kecil.

Selain penambahan sarana pipa baru, *Janggol* memiliki aturan mengenai pembebasan biaya pengguan air. hal ini dikhsuuskan bagi warga desa yang berstatus janda, lansia, yatim piatu, tempat ibadah dan majlis ta'lim, dan sekolah. Penerapan aturan ini dilakukan atas kesepakatan *Janggol*, dengan memepertimbangkan nilai-nilai yang melekat di masyarakat lokal.

Meskipun peraturan ini berlaku khusus, namun terdapat juga warga yang enggan untuk membayar iuran. Terkait hal tersebut, hingga saat upaya yang dilakukan oleh *Janggol* dengan memberikan teguran. Namun, jika warga tersebut bersikeras tidak ingin membayar, *Janggol* akan berkordinasi dengan Kepala Desa sebagai Mediator untuk menanggapi hal tersebut.

Pengelolaan air yang dilaksanakan di Desa Srogol belum berjalan dengan baik, mengingat upaya-upaya dalam pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakat terus

ditingkatkan meski belum berjalan optimal dengan ditemuinya beberapa hambatan khususnya dalam kapasitas kelembagaan pengelola air. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, seperti belum terlegitimasinya *Janggol* sebagai institusi legal formal oleh pihak aparat desa, kurangnya pengetahuan kelembagaan, minimnya kesadaran seluruh entitas desa khususnya terkait fenomena air yang hadir berdampingan dalam kehidupan, hal ini akan berimplikasi pada keberlangsungan dan keberlanjutan kualitas hidup masyarakat.

Kapasitas kelembagaan lokal belum berperan maksimal dikarenakan, minimnya ruang partisipasi bagi masyarakat lebih luas guna menciptakan sistem pengelolaan air yang akuntabel, agar terciptanya pengelolaan yang baik dengan melibatkan pemerintah desa dan masyarakat. Pada tahapan perencanaan serta mekanisme kerja, Lembaga lokal tidak memiliki struktur dan tata aturan yang menjelaskan peran serta legalitas janggol sebagai pengelola air melalui peraturan desa atau surat keputusan kepala desa. Sebagai suatu Lembaga, janggol belum terinstitutionalisasi secara formal dan legal, legal perlu adanya tata aturan yang menjadi acuan kerangka kerja dan fungsi janggol, melalui pembuatan AD/ART lembaga pengelola air, agar janggol sebagai pengelola air menjadi

lembaga yang formal dan memiliki kejelasan mengenai wilayah cakupan dan batasan kerja janggol sebagai lembaga publik.

Dalam menciptakan dan menjaga keberlangsungan jaringan organisasi Lembaga dibutuhkan upaya kolaborasi guna menjaga keteraturan dan keberlangsungan ketersediaan air, mengingat entitas pengguna sumber daya air yang beragam namun minimnya peran masyarakat dalam melakukan pengawasan kinerja *Janggol*. Berikutnya Peran kepala desa sebagai pimpinan sangat dibutuhkan dalam kecakapan melihat kondisi eksisting mengenai skala prioritas kebutuhan pembangunan bagi masyarakat desa, hal ini akan berimplikasi pada keberlangsungan sistem tata kelola lembaga yang transparan dan akuntabel.

### SIMPULAN

Pengelolaan air yang dilakukan pada level komunitas secara umum bersifat sukarela. Karena itu, kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan air yang dilakukan *Janggol* di Desa Srogol, masih terdapat beberapa kekurangan. Akibatnya, pengelolaan air kurang optimal. Kekurangan tersebut diantaranya: 1) pegawai yang terlibat dalam pengelolaan air bersih memiliki keterampilan yang rendah keterampilan dan pengetahuan anggota *Janggol* dalam pengelolaan masih

rendah, 2) elemen yang terlibat dalam pengelolaan air bersih belum mampu menjalankan perannya masing-masing, 3) tidak ada hubungan kerjasama dan koordinasi yang terjalin, antara *Janggol* Pemerintah Desa, dan masyarakat dan; 4) belum adanya rancangan pengelolaan air yang dibentuk dalam Peraturan desa.

### DAFTAR PUSTAKA

- Carney, D. (1998). Sustainable rural livelihoods : what contribution can we make? *Journal of International Development*.
- Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., Donnelly Jr, J. H., & Konopaske, R. (2012). Organizations Behaviour, Structure, Processes. In *The McGrawHill companies*.
- Lieberherr, E., & Ingold, K. (2019). Actors in water governance: Barriers and bridges for coordination. *Water (Switzerland)*.  
<https://doi.org/10.3390/w11020326>
- Miles, M., & Huberman, A. (1994). Miles and Huberman Chapter 2. In *Qualitative Data Analysis*.
- Pailler, S., Naidoo, R., Burgess, N. D., Freeman, O. E., & Fisher, B. (2015). Impacts of community-based natural resource management on wealth, food security and child health in Tanzania. *PLoS ONE, 10*(7).  
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0133252>
- Stone, M. T., & Nyaupane, G. (2014). Rethinking community in community-based natural resource management. *Community Development, 45*(1).  
<https://doi.org/10.1080/15575330.2014>

3.844192

desa-srogol-gruduk-kantor-desa-  
pasir-buncir-kecamatan-caringin/.

- UN-Water. (2013). Water Security and the Global Water Agenda. A UN-Water analytical brief. In *Analytical Brief*.
- Widyawati, Widianingsih, I., & Pancasilawan, R. (2018). Organizational Network in the Development of Mamminasata Urban Areas, South Sulawesi Province. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian*, 8(1).
- Willems, S. (2004). Institutional capacity and climate actions: summary paper. *Organization for Economic Co-Operation and Development, Environment Directorate*.
- Agrawal, Arun, and Clark C. Gibson. 1999. "Enchantment and Disenchantment: The Role of Community in Natural Resource Conservation." *World Development*.
- Armitage, Derek. 2005. "Adaptive Capacity and Community-Based Natural Resource Management." *Environmental Management*.
- Bakker, Karen. 2003. "Archipelagos and Networks: Urbanization and Water Privatization in the South." *Geographical Journal* 169(4).
- Barnett, Matthew J., Douglas Jackson-Smith, and Joanna Endter-Wada. 2019. "Implications of Nontraditional Housing Arrangements for Urban Water Management in the United States Intermountain West." *Society and Natural Resources*.
- Berimbang.com. 2019. "Adanya Penyuntikan Pipa Air Bersih Warga Desa Srogol Gruduk Kantor Desa Pasir Buncir Kecamatan Caringin." <https://berimbang.com/adanya-penyuntikan-pipa-air-bersih-warga>
- Bradshaw, Ben. 2003. "Questioning the Credibility and Capacity of Community-Based Resource Management." *Canadian Geographer*.
- Cain, Nicholas L., and Peter H. Gleick. 2005. "The Global Water Crisis." *Issues in Science and Technology*.
- Campbell, Lisa M., and Arja Vainio-Mattila. 2003. "Participatory Development and Community-Based Conservation: Opportunities Missed for Lessons Learned?" *Human Ecology*.
- Carney, Diana. 1998. "Sustainable Rural Livelihoods : What Contribution Can We Make?" *Journal of International Development*.
- Chalmers, A. F. 1999. "What Is This Thing Called Science? 4e Edition." *Hackett Publishing Compagny*.
- Creswell, John W. 2007. "Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approaches." *SAGE Publications*.
- Dale, Allan et al. 2020. "Governing Community-Based Natural Resource Management in Australia: International Implications." *Land* 9(7).
- Fabricus, Christo, Eddie Koch, Hector Magome, and Stephen Turner. 2013. Rights, Resources and Rural Development: Community-Based Natural Resource Management in Southern Africa *Rights, Resources and Rural Development: Community-Based Natural Resource Management in Southern Africa*.

- Grey, David, and Claudia W. Sadoff. 2007. "Sink or Swim? Water Security for Growth and Development." *Water Policy* 9(6).
- Gruber, James S. 2010. "Key Principles of Community-Based Natural Resource Management: A Synthesis and Interpretation of Identified Effective Approaches for Managing the Commons." *Environmental Management*.
- Homer-Dixon, Thomas F. 2010. *Environment, Scarcity, and Violence*.
- Indonesia, Presiden Republik. 2004. *Undang-Undang No 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air*. indonesia: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- J brown, N Mitchell, M Beresford. 2005. *The Protected Landscape Approach; Linking Nature, Culture, Adn Community*. Gland, Switzerland, and cambridge: IUCN-The World Conservation Union.
- Krakow, Carly A. 2020. "The International Law and Politics of Water Access: Experiences of Displacement, Statelessness, and Armed Conflict." *Water (Switzerland)*.
- Landon, Sam. 1998. "Community-Based Natural Resource Management. Readings and Resources for Researchers." *Community-Based Natural Resource Management Program Initiative, IDRC*.
- Leach, Melissa, Robin Mearns, and Ian Scoones. 1997. "Challenges to Community-Based Sustainable Development: Dynamics, Entitlements, Institutions." *IDS Bulletin*.
- Lieberherr, Eva, and Karin Ingold. 2019. "Actors in Water Governance: Barriers and Bridges for Coordination." *Water (Switzerland)*.
- Meinzen-Dick, Ruth, and Anna Knox. 1999. Paper presented at Workshop on Collective Action, Property Rights, and Devolution of Natural Resource, Puerto Azul, Philippines, June 21-24 *Collective Action, Property Rights, and Devolution of Natural Resource Management*.
- Miles, MB, and AM Huberman. 1994. "Miles and Huberman Chapter 2." In *Qualitative Data Analysis*.
- Moriarty, Patrick, Stef Smits, John Butterworth, and Richard Franceys. 2013. "Trends in Rural Water Supply: Towards a Service Delivery Approach." *Water Alternatives*.
- Newson, Malcolm, and Liz Chalk. 2004. "Environmental Capital: An Information Core to Public Participation in Strategic and Operational Decisions - The Example of River 'Best Practice' Projects." *Journal of Environmental Planning and Management*.
- Olsson, Per, Carl Folke, and Fikret Berkes. 2004. "Adaptive Comanagement for Building Resilience in Social-Ecological Systems." *Environmental Management*.
- Ostrom, Elinor. 2015. *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*.
- phillpa M Brock, Daniel K Y Tan. 2020. "A Second Take on the Role of Science; Yhe Case for Apllying to Natural; Resource Management." *sustainable earth: 1-12*.

- Ravnborg, Helle Munk. 2004. "DIIS Brief Water and Conflict – Lessons Learned and Options Available on Conflict Prevention and Resolution in Water Governance." *Conflict*.
- Ritchie, Jane, Jane Lewis, Carol McNaughton Nicholls, and Rachel Ormston. 2013. "The Foundations of Qualitative Research. Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Students and Researchers." *Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Students and Researchers*.
- Robert D Putnam, Lewis Feldstein, Donald J Cohen. 2003. *Better Together: Restoring the American Community*. New York: Simon and Schuster.
- Ronald A. Heifetz and Marty Linsky. 2003. "Leadership on the Line: Staying Alive through the Dangers of Leading." *The Leadership Quarterly*.
- Rosegrant, Mark W., Claudia Ringler, and Tingju Zhu. 2009. "Water for Agriculture: Maintaining Food Security under Growing Scarcity." *Annual Review of Environment and Resources* 34.
- Scheberle, Denise. 2000. "Moving Toward Community-Based Environmental Management: Wetland Protection in Door County." *American Behavioral Scientist*.
- Smits, Stef, Johnny Rojas, and Paola Tamayo. 2013. "The Impact of Support to Community-Based Rural Water Service Providers: Evidence from Colombia." *Water Alternatives*.
- Spiteri, Arian, and Sanjay K. Nepal. 2006. "Incentive-Based Conservation Programs in Developing Countries: A Review of Some Key Issues and Suggestions for Improvements." *Environmental Management*.
- Watson, Dale, Colin Arrowsmith, and Rob Goudey. 2003. "Water Availability: A Regional Water Quality Problem." *International Journal of River Basin Management*.
- Wildavsky, Aaron. 1973. "If Planning Is Everything, Maybe It's Nothing." *Policy Sciences*.